

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintah Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Palima -Curug Serang, Tlp (0254) 8480015

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dengan segenap kepasrahan dan keikhlasan selayaknya senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, memperhatikan perkembangan serta perubahan dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, maka OPD berkewajiban untuk melakukan penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD, seiring hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melakukan perubahan/revisi dokumen Renstra Tahun 2017-2022. Dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan bahan acuan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun (2017–2022), dan akan dijabarkan kedalam rencana tahunan, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan. Seluruh aparatur dinas ketahanan pangan berkewajiban melaksanakan dan mengimplementasikan program-program sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini. Hal ini diperlukan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan ketahanan pangan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Bahwa penyusunan Renstra ini telah mengacu pada kaidah-kaidah penyusunan Renstra sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Harapan kami semoga dokumen revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dapat memenuhi harapan kita semua, untuk menjadi dokumen perencanaan yang handal, rasional dan dapat dipercaya, dalam mencapai visi Provinsi Banten 2017-2022 yaitu : ” Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah” serta untuk dapat mewujudkan Ketahanan Pangan di Banten dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat bekerja serta semoga sukses.

BAB 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan permintaan pangan di Provinsi Banten secara merata dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal dan kearifan lingkungan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing produk, dengan memanfaatkan keunggulan komperatif dan kompetitif dan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, sehingga pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada poin 6 (enam) a menyatakan bahwa Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024. Namun, ada dokumen perencanaan yang belum diatur tentang tatacara penyusunannya yaitu dokumen perencanaan menengah untuk tahun 2023 sampai tahun 2026. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan rancangan perencanaan jangka menengah agar pembangunan tetap berjalan, konsisten dan berkesinambungan..

Berdasar kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu OPD di Provinsi Banten, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, dengan fungsi dan kewenangan antara lain : 1) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi; 2) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi; 4) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 5) Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi; 6) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota; 7) Penanganan kerawanan pangan provinsi; 8) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan 9) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, maka diperlukan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mempedomani Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022. Pada Peraturan Perundang-undangan tersebut diwajibkan bahwa setiap OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. RUANG LINGKUP

Beberapa Batasan pengertian lingkup pangan berdasarkan UU No.18 Tahun 2012 Tentang pangan antara lain : (1) **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya. Terutama yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman; (2) **Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan; (3) **Keamanan Pangan** adalah kondisi dan

upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi; (4) **Ketersediaan Pangan** adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan; (5) **Penganekaragaman Pangan** adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; (6) **Pangan Lokal** adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; (7) **Pangan Segar** adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan; (8) **Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. 20. Petani adalah warga negara; (9) **Cadangan Pangan** Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah dan (10) **Bantuan Pangan** adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

1.3. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/HK.140/4/2105 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 7);
27. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
28. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);

29. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.539-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Banten;
30. Keputusan Gubernur Nomor 535.05/Kep.277-Huk/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan Provinsi Banten;

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten bersama masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan selama periode tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
3. Terumuskannya strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026;
4. Terumuskannya rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan **sistematika penulisan** sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang : latar belakang; Ruang Lingkup; landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang : 1) Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah; 2) Sumber daya Perangkat Daerah; 3) Kinerja pelayanan perangkat daerah berdasar Renstra periode 2017-2022; 4) Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten; 2) Telaahan visi, misi RPJMD; 3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah; 4) Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan 5) Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menyajikan tentang : 1) Tujuan (Sandingan tujuan daerah dengan tujuan perangkat daerah, tampilkan indicator tujuan daerah; 2) Sasaran (Sandingan sasaran daerah dengan sasaran perangkat daerah, tampilkan indicator sasaran daerah dan perangkat daerah)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang : Sandingan strategi daerah dengan strategi PD (Strategi PD berhubungan dgn strategi Daerah sebaliknya dengan Arah kebijakan arah kebijakan perangkat daerah dalam renstra di turunkan kembali menjadi arah kebijakan tahunan renstra yg mana menjadi cikal bakal program, kegiatan, dan sub kegiatan); Sandingan arah kebijakan daerah dengan PD; Menyusun arah kebijakan tahunan PD; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan tentang : rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengungkapkan tentang indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Provinsi Banten tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB 2

Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pergub No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 83/2016 Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

- (1) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi;
- (2) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- (3) Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
- (4) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (5) Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;

- (6) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
- (7) Penanganan kerawanan pangan provinsi;
- (8) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- (9) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota; dan
- (10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

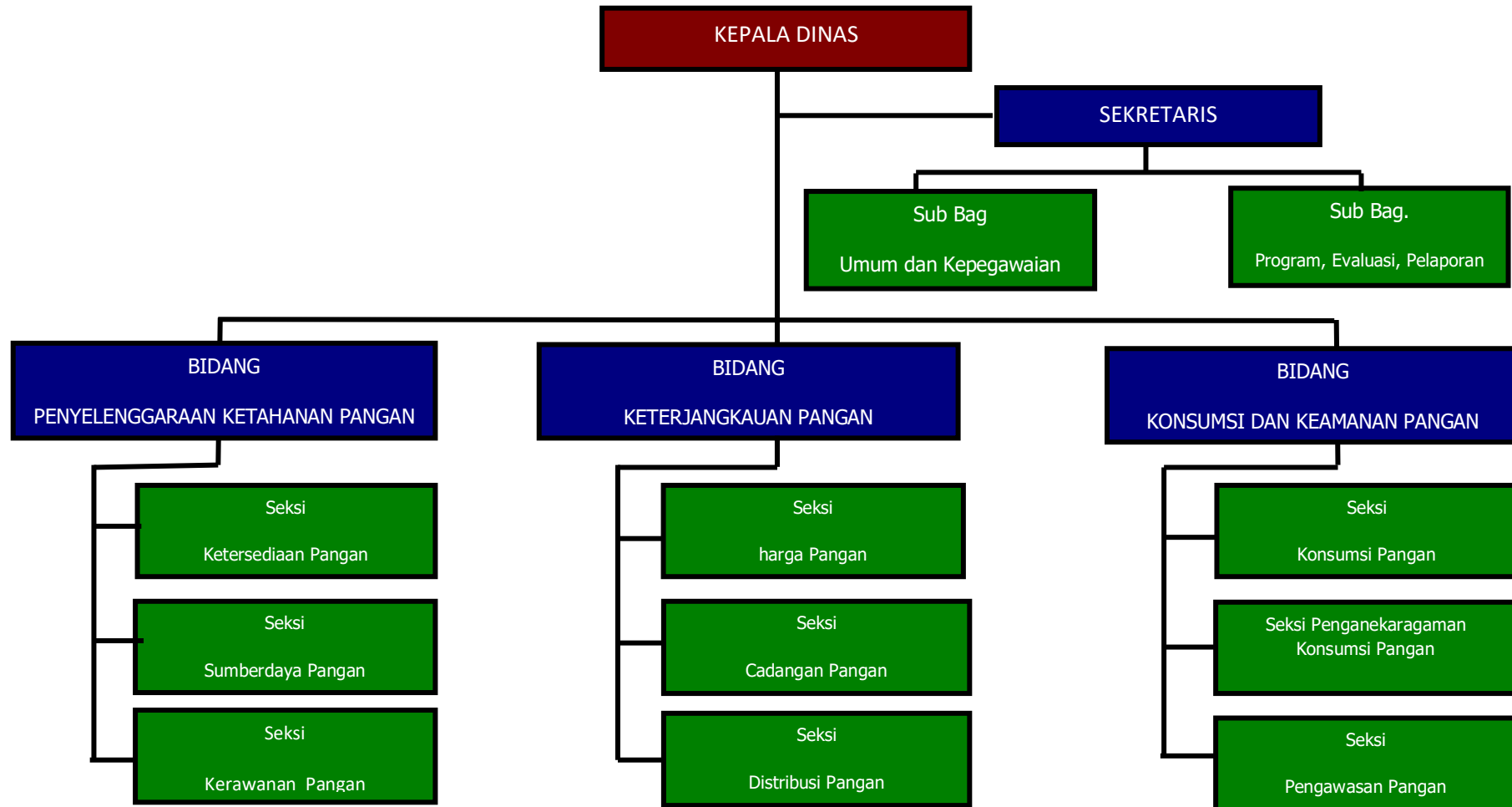
Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- (a) Merumuskan rencana operasional Dinas Ketahanan Pangan ;
- (b) Menyelidiki dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku ;
- (c) Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir ;
- (d) Merumuskan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (e) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
- (f) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas/badan/biro dengan unit kerja terkait ;
- (g) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan ;
- (h) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas ;
- (i) Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya ;
- (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Paragraf 20, Pasal 119) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Harga Pangan;
 - 2. Kepala Seksi Cadangan Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Distribusi Pangan.
- e. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional

**Gambar 1.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provsinsi Banten
(Lampiran PERGUB No. 83 Tahun 2016)**



1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan SOTK menurut Perda Nomor 8 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia/aparat dan sumber daya aset/modal. Sumber daya aparat yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebanyak 86 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 69,77% atau 60 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 30,23% atau 26 orang berstatus non PNS. Jumlah dan distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada berikut :

**Tabel 2.1. Jumlah dan Distribusi Pegawai
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan
(Per 31 Desember 2021)**

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH	(%)
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	11	35	14	60	69,77
2.	Pegawai Non PNS	0	0	0	0	26	30,23
JUMLAH		0	14	37	9	86	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan tingkat golongan, jumlah pegawai yang berstatus PNS (60 orang) didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 35 orang (58,33%). Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan IV dengan jumlah pegawai sebanyak 14 orang (23,33%). Sedangkan golongan II berjumlah 11 orang (18,33%). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, per 31 Desember 2021 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1, S2, dan S3) cukup dominan yaitu 46 orang dari jumlah total PNS 60 orang atau 76,66%, D3 sebanyak 6 orang

atau 10,00% dan SMU/SMA sebanyak 8 orang atau 13,33%. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sudah memadai. Secara keseluruhan (PNS dan TKS) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai, komposisi pegawai tamatan SLTA sebanyak 25 orang (29,07%), kualifikasi DIII/Akademi sebanyak 11 orang (12,79%), dan lulusan S1 sebanyak 37 orang (43,02%), sedangkan pegawai lulusan S2 sebanyak 12 orang (13,95%) dan S3 sebanyak 1 orang atau 1,16%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan kondisi distribusi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menurut tingkat serta tingkat pendidikannya dapat dilihat pada dibawah ini:

**Tabel 2.2. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan
(Per 31 Desember 2021)**

NO	STRUKTUR JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretars/Kepala Bidang	-	-	-	-	-	4	1	5
3.	Kepala Seksi/ Sub Bidang	-	-	-	-	7	7	-	14
4.	Pelaksana	8	-	-	7	21	4	-	40
5.	Pegawai Non PNS	15	-	-	1	10	-	-	25
JUMLAH		23	-	-	8	38	15	2	86
PERSENTASE (%)		26,74	-	-	9,30	44,18	17,44	2,32	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup tinggi, namun jika meninjau komposisi pegawai pada instansi saat ini, khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum memenuhi kondisi yang diharapkan. Adapun komposisi pegawai berdasar

kuantitas dan kualitas pegawai sesuai kondisi saat ini (Per 31 Desember 2021) dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 2.3. Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
(Per 31 Desember 2021)**

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	1	PNS	S3
2.	Sekretaris	1	PNS	S3
	• Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S2/Manajemen
	▪ Pelaksana	8	PNS	S2 = 2, S1 = 5, D3 = 1,
		3	TKS	S1 = 3
	• Sub Bagian Kepegawaian dan Umum			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 /Ekonomi
	▪ Pelaksana	7	PNS	S1= 5, SMU = 2 orang
		15	TKS	S1=2 orang, SMU =13 orang
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	PNS	S2/Manajemen
	• Seksi Ketersediaan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, SMU = 1
		1	TKS	SMU = 1
	• Seksi Sumberdaya Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Kesehatan

				Masyarakat
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, SMU = 2
	• Seksi Kerawanan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Pertanian
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 =2, SMU = 1
		1	TKS	D3 = 1
4.	Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan	1	PNS	S1 = Pemerintahan
	• Seksi Harga Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	2	PNS	S2 = 1 D3 = 1
		1	TKS	SMU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	• Seksi Cadangan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, D3 = 1, SMU = 1
		1	TKS	S1 = 1
	• Seksi Distribusi Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	5	PNS	S2 = 2, S1 = 2, D3 = 1
		2	TKS	D3 = 1, S1 = 1
5.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	• Seksi Konsumsi Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2

	▪ Pelaksana	1	PNS	D3 = 1
		1	TKS	SMU = 1
	• Seksi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	S1 = 1
	• Seksi Pengawasan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1 D3 = 1, SMU = 1
JUMLAH		86		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, 2021

Secara umum kondisi daya dukung sarana dan prasarana penunjang operasional pada dinas Ketahanan Pangan relatif memadai, sehingga cukup membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tercapainya kelancaran dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi, kearsipan, perencanaan, dan pengendalian.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk periode 2017-2022 Dinas Ketahanan Provinsi Banten sebagai lembaga penyelenggara urusan Pemerintahan Provinsi di bidang urusan pangan mempunyai fungsi sebagai inisiator, fasilitator dan regulator atas penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Banten dengan Output yang dihasilkan adalah Indek ketahanan Pangan Daerah. Dimana indeks ini dibangun dari beberapa pilar ketahanan pangan yaitu : **(a) Ketersediaan Pangan**, Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan

pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek kecukupan pangan dilihat dari dua indikator, yaitu kecukupan persediaan pangan dan tidak kekurangan pangan. Kecukupan persediaan pangan yang dimaksud adalah apakah kebutuhan akan pangan selama setahun yang lalu telah tercukupi dalam rumahtangga tersebut, serta untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat; **(b) Keterjangkauan/Akses Pangan**, adalah kemampuan rumahtangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang beras dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan; **(c) Pemanfaatan Pangan**, meliputi penggunaan pangan oleh rumahtangga serta meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air serta meliputi status kesehatan anggota rumahtangga. Dimensi pemanfaatan pangan sendiri diwakili dua aspek. Pertama, aspek kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan yang diukur dengan dua indikator, yaitu kecukupan asupan kalori dan kecukupan asupan protein. Kedua, aspek kualitas air yang diukur oleh dua indikator, yakni kualitas sumber air utama untuk minum dan sumber air utama untuk masak serta **(d) Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**, Peredaran pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan mutunya, meningkatkan daya saing produk pangan segar serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar.

Capaian Kinerja outcome atas Indikator Ketersediaan Pangan selama periode tahun 2018-2021 tidak mencapai target hal ini dikarenakan oleh : a) terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah; b) belum tersediannya data dan informasi sumberdaya pangan sebagai basis informasi; c) belum adanya penetapan harga pangan lokal di tingkat Kabupaten/Kota; d) Daya beli masyarakat berkurang akibat PHK dampak Covid 19; e) Masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun serta; f)

Kurangnya penggunaan teknologi yang digunakan pada saat proses tanam hingga masa panen komoditas pangan.

Capaian Kinerja outcome atas Indikator Keterjangkauan/Akses Pangan terkendala oleh : a) Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, yang berakibat pada tingginya ongkos angkut; b) Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukan oleh coefficient of variation (cv), yang berakibat pada inflasi beberapa komoditi pangan strategis; d) Tidak updatenya peta FSVA sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dalam penanganan rawan pangan.

Capaian kinerja outcome Indikator Pemanfaatan Pangan terkendala oleh : a) relatif rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam dikarenakan budaya masyarakat yang menganggap belum makan bila belum makan nasi; b) Belum optimalnya promosi B2SA ke level masyarakat secara menyeluruh; c) Belum seragamnya angka AKE di Kabupaten/Kota dalam menghitung skor PPH Konsumsi.

Capaian kinerja outcome indikator Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi, faktor pendorongnya adalah Besarnya kesadaran para pelaku usaha PSAT akan keamanan pangan, sedangkan faktor penghambatnya adalah Belum memadai dan mencukupinya fasilitasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

2.4. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018-2021

Sasaran/Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target Rensta Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Ratio Capaian (%)			
	RPJMD Sebelum Perubahan	RPJMD Sesudah Perubahan		RPJMD Pemetaan Kepmen 050 Tahun 2020	RPJMD Sebelum Perubahan	RPJMD Sesudah Perubahan		RPJMD Pemetaan Kepmen 050 Tahun 2020	RPJMD Sebelum Perubahan	RPJMD Sesudah Perubahan		RPJMD Pemetaan Kepmen 050 Tahun 2020
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang Akuntabel												
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	85	85	85	85								
Program Tata Kelola Pemerintahan												
Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) (Skala 1-4)	2,8				2,8				100			
Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan												
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)		100	100			100	100			100	100	
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)		100	100			100	100			100	100	
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)		100	100			100	100			100	100	
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)		100	100			100	100			100	100	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi												
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%)				100				100				100

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)				100				100				100
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)				100				100				100
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)				100				100				100
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga												
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	89,20	90,60	83,50	84,50	83,75	83,29	81,93	82,90	93,89	91,93	98,12	98,10
Program Peningkatan Ketahanan Pangan												
Ketersediaan pangan (%)	95,10	96,30	93,50		85,78	89,83	88,91		90,20	93,28	95,09	
Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan												
Keterjangkauan/ akses pangan (%)	82,50	85,50	84,50		68,89	82,19	81,02		83,50	96,13	95,88	
Program Perlindungan Konsumen Pangan												
Pemanfaatan Pangan (%)	90,00	90,00	80,50		65,89	77,84	75,85		73,21	86,49	94,22	
Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (S%)			10,00				16,88				168,80	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
Keterjangkauan/ akses pangan (%)				85,50				80,21				93,81
Pemanfaatan Pangan (%)				81,50				78,03				95,74
Program Penanganan Kerawanan Pangan												
Ketersediaan pangan (%)				94,50				90,45				95,71
Program Pengawasan Keamanan Pangan												

Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (S%)				10,00				17,44				174,40
--	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--------

2.4.1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Daya dukung wilayah Provinsi Banten dalam menyediakan pangan bagi penduduknya pada tahun 2021 adalah sebesar 104,9% dari AKE atau setara dengan 2.517 kkal/kapita/hari. Adapun ketersediaan protein sebesar 83,98 g/kap/hari.. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa penyediaan pangan di Provinsi Banten sudah mandiri dalam artit Provinsi sudah mampu menyediakan kebutuhan pangan penduduknya. Namun, dilihat dari skor PPH menunjukkan bahwa jenis bahan pangan yang dapat disediakan oleh Provinsi Banten masih belum beragam sesuai dengan norma standar untuk hidup sehat. Oleh karena itu, selain bertumpu pada produksi sendiri ketersediaan pangan Provinsi Banten masih harus ditopang oleh pasokan dari daerah lain (impor). Sehingga situasi ketersediaan pangan Provinsi Banten tahun 2021 disusun juga dengan menggunakan data ekspor-impor pangan menggunakan pendekatan data estimasi.

Pangan yang tersedia di Provinsi Banten sudah cukup beragam dengan skor PPH sebesar 96,06. Pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimum adalah padi-padian (25,0), pangan hewani (24), pangan minyak dan lemak (5,0) Kacang-kacangan (10) serta Sayuran dan buah (30). Pangan yang belum mencapai skor PPH maksimum adalah umbi-umbian (0,9 dari 2,5), buah biji berminyak (0 dari 1), Serta gula (1,1 dari 2,5)

Tabel.2.7. Produksi Komoditas Pangan Nabati di Provinsi Banten

No	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Beras	64.582	883.221,70	1.339.835
2	Jagung	103.709	119.206	98.349
3	Kedelai	1.202	1.202	11.668
4	Kacang Tanah	6.916	3.942	4.544
5	Ubi Kayu	70.915	70.915	60.038

6	Ubi Jalar	12.788	12.788	15.284
7	Sayur	413.502	149.066	162.054
8	Buah-Buahan	148.518	473.915	470.406

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

Tabel.2.8. Produksi Komoditas Pangan Hewani di Provinsi Banten

No	Jenis Pangan	Jumlah Produksi (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Daging Sapi dan Kerbau	42.178	42.178	21.421,66
2	Daging Ayam	137.197	137.197	4.838,24
3	Telur	46.974	9.016	35.691,00
4	Susu	3.701	3,6	66.747,75
5	Ikan	14.798	14.797,53	14.797,53

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

Tabel.2.9. Ketersediaan Energi dan Protein di Provinsi Banten

No	Jenis Pangan	Jumlah		
		2019	2020	2021
1	Energi (Kal/Kap/Hari)	2.584	2.546	2.517
2	Protein (Gram/Kap/Hari)	76,43	68,23	83,98

Sumber : Neraca Bahan Makanan Tahun 2019-2021

Data cadangan pangan (beras) stok akhir tahun 2021 yaitu sebanyak 301.784,01 kg dengan stok awal tahun 402.588,59 kg yang disimpan di Bulog.

Tabel.2.10. Jumlah Stok CPP di Provinsi Banten (Kg)

Tahun	Stok Awal	Pengadaan	Penyaluran	Penyusutan	Stok Akhir
2018	108.247,81	116.000	-	15.313,12	208.934,69
2019	208.934,69	45.000	-	4.651,84	249.282,85
2020	249.282,85	985.916	831.830	780,26	402.588,59
2021	402.588,59	211.100	305.805	6.054,58	301.784,01

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

2.4.2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Konsumsi penduduk Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah sebesar 103,4% dari AKE atau setara dengan 2.223 kkal/kapita/hari. Skor PPH Provinsi Banten pada Tahun 2021 adalah 84,0. mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

Tabel.2.11. Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan di
Provinsi Banten

No	Kelompok Pangan	Jumlah Konsumsi (Kg)		
		2019	2020	2021
1	Padi-padian	124	121,4	121,83
2	Umbi-umbian	13,1	13,3	13,6
3	Pangan Hewani	48	47,2	41
4	Minyak dan Lemak	10,4	11,1	11,3
5	Buah/Biji Berminyak	0,7	0,6	0,8
6	Kacang-kacangan	14	13,1	13
7	Gula	4,6	5	4,8

8	Sayur dan Buah	93,2	88,7	86,8
---	----------------	------	------	------

Sumber : Anaisi PPh Susenas Tahun 2019-2021

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian integral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat.

Sejak berdirinya UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, jumlah sertifikat yang diterbitkan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha PSAT sudah banyak yang mengindahkan penjaminan mutu dan keamanan PSAT.

Jumlah pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/register mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 13 pelaku usaha pada tahun 2017 hingga 30 pelaku usaha di tahun 2020.

Berdasarkan grafik di bawah ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 32 sertifikat menjadi 135 sertifikat. Register/Izin Edar PSAT menempati urutan yang terbanyak dalam pelayanan, yaitu 246 register dan terendah izin rumah kemas 6 sertifikat.

Tabel.2.12. Rekapitulasi Sertifikat dan Register PSAT
Tahun 2016-2020

**REKAPITULASI SERTIFIKAT DAN REGISTER
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
(Tahun 2016 – 2020)**

NO.	KABUPATEN/KOTA	SERTIFIKAT			JUMLAH	REGISTER	JUMLAH	TOTAL
		PRIMA 3	JAMINAN MUTU HYDROPONIK	RUMAH KEMAS		PSAT		
1	Kabupaten Lebak	4	0	0	4	11	11	15
2	Kabupaten Pandeglang	5	0	0	5	11	11	16
3	Kabupaten Serang	7	0	1	8	6	6	14
4	Kabupaten Tangerang	4	1	2	7	91	91	98
5	Kota Cilegon	1	0	0	1	5	5	6
6	Kota Tangerang	7	11	2	20	56	56	76
7	Kota Serang	1	4	0	5	6	6	11
8	Kota Tangsel	0	0	1	1	60	60	61
JUMLAH		29	16	6	51	246	246	297



Dinas Ketahanan Pangan

2.4.3. Penanganan Kerawanan Pangan

Berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas, FSVA), Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengutamakan penanganan Daerah Rawan Pangan pada prioritas 1 s.d. 3 (sangat rentan, rentan, cukup rentan). Kerentanan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh beberapa hal : angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus underweight pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda 4, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normative perkapita terhadap ketersediaan sereal meningkat.

Oleh karena itu, penanganan serius dan komprehensif terhadap daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan sangat diperlukan. Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama

masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan, baik transien maupun kronis.

Berdasarkan hasil analisis komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021, dari total 155 Kecamatan yang ada di Provinsi Banten terdapat 18 Kecamatan (11,6%) yang masuk ke dalam prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) dan 137 Kecamatan lainnya (88,4%) masuk ke dalam prioritas 4-6 (tahan pangan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2.13. Sebaran Kecamatan berdasarkan Prioritas Hasil Analisis
Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Prioritas	Jumlah Kecamatan	Persentase
1	1	0,64
2	3	1,93
3	14	9,03
4	42	27,1
5	62	40
6	33	21,3
Total	155	100

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Sebaran wilayah Kecamatan prioritas 1-3 (rentan rawan pangan) terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kecamatan prioritas 1 terdapat di Kabupaten Tangerang (1 Kecamatan). Kecamatan Prioritas 2 terdapat di Kabupaten Tangerang (3 Kecamatan). Kecamatan Prioritas 3 terdapat di Kabupaten Pandeglang (1 Kecamatan), Kabupaten Tangerang (9 Kecamatan), Kabupaten Serang (2 Kecamatan), dan Kota Serang (2 Kecamatan).

Tabel 2.14 Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021
Prioritas 1-3

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Tangerang	Cisauk	1
2	Tangerang	Curug	2

3	Tangerang	Pagedangan	2
4	Tangerang	Kosambi	2
5	Tangerang	Labuan	3
6	Pandeglang	Cikupa	3
7	Tangerang	Kelapa Dua	3
8	Tangerang	Pasar Kemis	3
9	Tangerang	Gunung Kaler	3
10	Tangerang	Kemiri	3
11	Tangerang	Sepatan	3
12	Tangerang	Sepatan Timur	3
13	Tangerang	Pakuhaji	3
14	Tangerang	Teluknaga	3
15	Serang	Waringin Kurung	3
16	Serang	Pulo Apel	3
17	Kota Serang	Curug	3
18	Kota Serang	Kasemen	3

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Sedangkan sebaran wilayah untuk Kecamatan prioritas 4-6 (tahan pangan) menyebar di 4 Kabupaten dan 4 Kota. Kecamatan prioritas 4 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Kecamatan Prioritas 5 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Kecamatan prioritas 6 terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2.14 Hasil Analisis Komposit FSVA Provinsi Banten Tahun 2021
Prioritas 1-3

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Prioritas
1	Pandeglang	Sumur	4
2	Pandeglang	Cibaliung	4

3	Pandeglang	Cibitung	4
4	Pandeglang	Picung	4
5	Pandeglang	Cisata	4
6	Pandeglang	Jiput	4
7	Pandeglang	Pulosari	4
8	Pandeglang	Mandalawangi	4
9	Pandeglang	Cimanuk	4
10	Pandeglang	Kaduhejo	4
11	Pandeglang	Mekarjaya	4
12	Pandeglang	Majasari	4
13	Pandeglang	Cadasari	4
14	Pandeglang	Karangtanjung	4
15	Pandeglang	Koroncong	4
16	Lebak	Cilograng	4
17	Lebak	Cijaku	4
18	Lebak	Sobang	4
19	Lebak	Cimarga	4
20	Lebak	Rangkasbitung	4
21	Tangerang	Cisoka	4
22	Tangerang	Solear	4
23	Tangerang	Tigaraksa	4
24	Tangerang	Jambe	4
25	Tangerang	Panongan	4
26	Tangerang	Legok	4
27	Tangerang	Sindang Jaya	4
28	Tangerang	Balaraja	4
29	Tangerang	Jayanti	4
30	Tangerang	Sukamulya	4
31	Tangerang	Kresek	4
32	Tangerang	Kronjo	4
33	Tangerang	Mekar Baru	4

34	Tangerang	Mauk	4
35	Tangerang	Sukadiri	4
36	Tangerang	Rajeg	4
37	Serang	Cinangka	4
38	Serang	Ciomas	4
39	Serang	Pabuaran	4
40	Serang	Cikande	4
41	Serang	Mancak	4
42	Serang	Pontang	4
43	Pandeglang	Cimanggu	5
44	Pandeglang	Cigeulis	5
45	Pandeglang	Panimbang	5
46	Pandeglang	Sobang	5
47	Pandeglang	Munjul	5
48	Pandeglang	Angsana	5
49	Pandeglang	Sindangresmi	5
50	Pandeglang	Bojong	5
51	Pandeglang	Saketi	5
52	Pandeglang	Pagelaran	5
53	Pandeglang	Sukaresmi	5
54	Pandeglang	Carita	5
55	Pandeglang	Cikedal	5
56	Pandeglang	Cipeucang	5
57	Pandeglang	Banjar	5
58	Lebak	Malingping	5
59	Lebak	Wanasalam	5
60	Lebak	Cihara	5
61	Lebak	Bayah	5
62	Lebak	Cibeber	5
63	Lebak	Cigemblong	5
64	Lebak	Banjarsari	5

65	Lebak	Cileles	5
66	Lebak	Cirinten	5
67	Lebak	Leuwidamar	5
68	Lebak	Muncang	5
69	Lebak	Cipanas	5
70	Lebak	Lebakgedong	5
71	Lebak	Sajira	5
72	Lebak	Cikurur	5
73	Lebak	Warunggunung	5
74	Lebak	Cibadak	5
75	Lebak	Kalanganyar	5
76	Lebak	Maja	5
77	Lebak	Curugbitung	5
78	Serang	Padarincang	5
79	Serang	Gunung Sari	5
80	Serang	Baros	5
81	Serang	Petir	5
82	Serang	Tunjung Teja	5
83	Serang	Cikeusal	5
84	Serang	Pamarayan	5
85	Serang	Bandung	5
86	Serang	Jawilan	5
87	Serang	Kopo	5
88	Serang	Kibin	5
89	Serang	Kragilan	5
90	Serang	Anyar	5
91	Serang	Bojonegara	5
92	Serang	Kramatwatu	5
93	Serang	Lebak Wangi	5
94	Serang	Carenang	5
95	Serang	Tirtayasa	5

96	Serang	Tanara	5
97	Tangerang	Benda	5
98	Cilegon	Ciwandan	5
99	Cilegon	Pulomerak	5
100	Cilegon	Cilegon	5
101	Serang	Walantaka	5
102	Serang	Cipocok Jaya	5
103	Serang	Serang	5
104	Serang	Taktakan	5
105	Pandeglang	Cikeusik	6
106	Pandeglang	Patia	6
107	Pandeglang	Menes	6
108	Pandeglang	Pandeglang	6
109	Lebak	Panggarangan	6
110	Lebak	Gunung Kencana	6
111	Lebak	Bojongmanik	6
112	Serang	Ciruas	6
113	Serang	Binuang	6
114	Tangerang	Ciledug	6
115	Tangerang	Larangan	6
116	Tangerang	Karang Tengah	6
117	Tangerang	Cipondoh	6
118	Tangerang	Pinang	6
119	Tangerang	Tangerang	6
120	Tangerang	Karawaci	6
121	Tangerang	Jati Uwung	6
122	Tangerang	Cibodas	6
123	Tangerang	Periuk	6
124	Tangerang	Batuceper	6
125	Tangerang	Neglasari	6
126	Cilegon	Citangkil	6

127	Cilegon	Purwakarta	6
128	Cilegon	Grogol	6
129	Cilegon	Jombang	6
130	Cilegon	Cibeber	6
131	Tangerang Selatan	Setu	6
132	Tangerang Selatan	Serpong	6
133	Tangerang Selatan	Pamulang	6
134	Tangerang Selatan	Ciputat	6
135	Tangerang Selatan	Ciputat Timur	6
136	Tangerang Selatan	Pondok Aren	6
137	Tangerang Selatan	Serpong Utara	6

Sumber : Peta FSVA Provinsi Banten Tahun 2021

Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Banten. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah kecamatan yang lebih besar pada prioritas 1-3. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik (Prioritas 6) terdapat di Kota Tangerang Selatan (100%) dan Kota Tangerang (92%).

BAB 3

Permasalahan Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategi bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan.

Berdasarkan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah dan

masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, antara lain :

Tabel 3.1. Permasalahan Urusan Pangan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Ketersediaan Pangan Strategis Dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan	Belum Optimalnya upaya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis ;• Belum Optimalnya Diversifikasi Pangan;• Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan;• Belum Optimalnya Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan dalam Mendukung Ketersediaan Pangan di Provinsi Banten;• Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor;• Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan adalah:

- Terdapat penurunan produksi pangan di Kota dari tahun ke tahun karena alih fungsi lahan yang cukup cepat.
- Rata-rata konsumsi kalori penduduk di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, namun untuk konsumsi protein terjadi sebaliknya
- Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor
- Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Uptd sertifikasi mutu dan keamanan pangan
- Tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual; penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha)
- Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan
- Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan
- Degradasi air, ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk pertanian
- Keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di pedesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025

Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah **"Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD V-3 Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

1. **Misi ke-2**, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Tujuan misi ke-2 adalah **Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi**. Sedangkan sasaran adalah **Meningkatnya ketahanan pangan**.
2. **Misi ke-4** yaitu **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**, dengan tujuan untuk **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan**. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi**.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2022-2026, **fungsi Dinas Ketahanan Pangan berada kedalam Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, memiliki 5 (lima) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

3.3 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024, yaitu: "Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sementara misinya adalah : (1) Mewujudkan Ketahanan Pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan (3) Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

BKP mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan yang akan diwujudkan melalui kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Selain itu pembangunan pangan turut mendukung daya saing pertanian dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus dalam rangka substitusi produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Dengan sasaran strategis yaitu : (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.

Tabel 3.2. Sandingan Sasaran dan Kinerja Renstra K/L dengan Sasaran dan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

No	Renstra K/L			Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten		
	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Penguatan Cadangan Pangan	Peningkatan Jumlah Pemda Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kab/Kota (%)	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (%)
		Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase daerah Rentan Rawan Pangan (%)		Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	Konsumsi Sayur dan Buah (gram/kapita/hari) Konsumsi Daging (kg/kapita/tahun) Konsumsi Protein Asal Ternak (gram/kapita/hari)		Peningkatan Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (%)
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase PSAT Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan (%)		Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Masih tingginya tingkat kerawanan pangan di Banten	Tidak semua Kabupaten/kota memiliki data Desa rawan Pangan	Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pangan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi Rawan Pangan	Belum semua Desa memiliki lumbung pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan	Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat	Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat
2	Banyaknya daerah "Rawan Bencana Alam"	Lambannya antisipasi dalam penyaluran bantuan pangan terhadap korban bencana alam	Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan	Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan dibidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi antara lain :

1. Ketersediaan Pangan:

Ketersediaan pangan menghadapi permasalahan antara lain :

- Luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif, serta adanya kompetisi pemanfaatan lahan pertanian pangan untuk penggunaan non pangan.
- Terdapat penurunan produksi pangan di Kota dari tahun ke tahun karena alih fungsi lahan yang cukup cepat.

- Tingkat pendapatan petani yang rendah, akibat dari biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi kepastian produksi dan harga jual.
- penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha).
- Degradasi air, ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan. Terjadi persaingan penggunaan air yang cukup besar antara kebutuhan air untuk air bersih, kebutuhan air untuk industri dan kebutuhan air untuk pertanian.
- Keterbatasan infrastruktur, kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di pedesaan serta terbatasnya prasarana usahatani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan ndapat tersedia sepanjang waktu

Cadangan pangan memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)/ Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya (Toko Tani Indonesia).

3. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :
 - (1) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
 - (2) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
4. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
 - (1) Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan.
 - (2) Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

- (3) Peningkatan status gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (b) peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
- (1) Masih banyaknya penggunaan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
 - (2) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan.
 - (3) Belum ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

BAB 4

Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan

Perencanaan Tahun 2023-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2023- 2026.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023-2026 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan

dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu : (1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; (2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan; (3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; (4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tujuan yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas ujuan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu :

1. *Misi ke-2*, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Tujuan misi ke-2 adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
2. *Misi ke-4* yaitu *Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*, dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1. Sandingan Tujuan Daerah dengan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi	Urusan	Bidang Urusan	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintah Bidang Pangan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintah Bidang Pangan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa

4.2. Sasaran

Sasaran yang tertuang dalam Renstra merupakan penjabaran atas sasaran yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu :

1. *Misi ke-2*, Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan, Sasaran misi ke-2 adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.
2. *Misi ke-4* yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, dengan Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi .

Tabel 4.2. Sandingan Sasaran Daerah dengan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
					1	2	3	4
1	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Skor)	70,23	71,23	71,73	72,23
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70-80	70-80	70-80	70-80

BAB 5

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Perumusan alternatif strategi pembangunan ketahanan pangan menggunakan analisis SWOT. Metode tersebut menghasilkan empat tipe strategi yaitu strategi kekuatan-peluang atau strategi SO (strengths-opportunities), strategi kelemahan-peluang atau strategi WO (weakness-opportunities), strategi kekuatan-ancaman atau strategi ST (strengths-threats) dan strategi kelemahan-ancaman atau strategi WT (weaknessthreats).

Tabel 5.1. Analisa SWOT Pembangunan Ketahanan Pangan

KEKUATAN	PELUANG
<ol style="list-style-type: none">1) Legalitas lembaga/instansi di bidang pembangunan ketahanan pangan;2) Kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sangat mendukung dalam pembangunan ketahanan pangan;3) Kejelasan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsi;4) Ketersediaan SDM (aparatur) secara struktural;5) Kkewenangan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi.	<ol style="list-style-type: none">1) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan dapat meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan;2) Kerangka regulasi dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota sangat mendukung dalam pembangunan ketahanan pangan3) Ketersediaan lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan4) Dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan baffer area/penyangga Ibu Kota, sehingga berpotensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat5) Pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat,6) Penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

KELEMAHAN	HAMBATAN
1) Alih fungsi lahan, penambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan 2) Dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan 3) Bahwa secara sosial dan budaya pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada paradigma “belum makan kalau belum makan nasi”, menjadi ancaman bagi pengembangan diverifikasi pangan 4) dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan baffle area/penyangga Ibu Kota, sehingga menjadi ancaman bagi stabilisasi harga dan ketersediaan, serta alur tata niaga	1) Alih fungsi lahan, penambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan 2) Dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Provinsi Banten merupakan baffle area/penyangga Ibu Kota, sehingga menjadi ancaman bagi stabilisasi harga dan ketersediaan, serta alur tata niaga; 3) Dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan; 4) Bahwa secara sosial dan budaya pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat yang bersandarkan pada paradigma “belum makan kalau belum makan nasi”, menjadi ancaman bagi pengembangan diverifikasi pangan

Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan tahun 2023-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Banten tahun 2023–2026.

Tabel 5.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

VISI: BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA						
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan						
TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi 2. Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sektor pangan 	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi 2. Menurunnya daerah rawan pangan 3. Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan 4. Meningkatnya pengawasan keamanan PSAT
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa						
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan 	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan b. Peningkatan efektivitas

		<p>evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan</p>	<p>kegiatan</p> <p>c. Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah</p> <p>d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah</p> <p>e. Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja</p>		<p>evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan</p>	<p>dan efisiensi program dan kegiatan</p> <p>c. Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah</p> <p>d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah</p> <p>e. Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja</p>
		<p>2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah</p>		<p>2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
		<p>3. Meningkatkan pelayanan public</p>	<p>Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur</p>		<p>3. Meningkatkan pelayanan public</p>	<p>Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur</p>
		<p>4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	<p>Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur</p>		<p>4. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</p>	<p>Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur</p>

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Arah Kebijakan Tahunan			
	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	<p>Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandirian pangan</p> <p>Penyusunan peta jalan ketahanan pangan sebagai</p> <p>Pengentasan daerah rawan pangan</p> <p>Meningkatkan pelayanan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan</p>	<p>Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandirian pangan</p> <p>Pengentasan daerah rawan pangan</p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan untuk meningkatkan pelayanan pengajuan sertifikasi mutu dan keamanan pangan</p>	<p>Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandirian pangan</p> <p>Pengentasan daerah rawan pangan</p> <p>Pemenuhan sarana penunjang UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan</p>	<p>Pemenuhan cadangan pemerintah daerah dengan pengadaan beras dan pembangunan Infrastruktur penunjang kemandirian pangan</p> <p>Pengentasan daerah rawan pangan</p> <p>Pemenuhan sarana penunjang UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan</p>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Pemantapan menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Reformasi birokrasi menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan Good and Clean Governance serta Layanan Berbasis EGovernment	Melanjutkan capaian reformasi birokrasi menuju Pelayanan Publik Berkualitas dan Penerapan Good and Clean Governance serta Layanan Berbasis EGovernment

BAB 6

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sebagaimana dalam dokumen RPJMD 2022-2026, menetapkan 2 (dua) kebijakan umum yang dijabarkan pada 5 (lima) program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, yaitu :

1. **Meningkatnya Daya Beli Masyarakat** , melalui Strategi Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan daerah dan arah kebijakan Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi serta Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sector pangan. Dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah, dengan target kinerja 70,23 % pada kondisi awal dan 72,23% pada kondisi akhir. Pelaksanaan capaian outcome tersebut, dijabarkan melalui 4 (empat) program, yaitu: a) Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan; b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; c) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
2. **Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi** dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan, arah kebijakannya :
 - Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
 - Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
 - Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah
 - Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah

- Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
- b. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah
- c. Meningkatkan pelayanan public, arah kebijakannya :
 - Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government
 - Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur
 - Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, kajian dan inovasi pelayanan publik
- d. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal.

Di ampuh melalui 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator kinerja program :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
- b. Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah
- c. Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah
- d. Inovasi Perangkat Daerah
- e. Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan untuk empat tahun kedepan (2023-2026) terdiri dari beberapa prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Kegiatan Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Berdasarkan RPJMD Tahun 2023-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NO	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN
I	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
			1	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia
			2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
			4	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan
II	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
			2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Prognosa Harga
			4	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan
			2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
			2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
			3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
			3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
			1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		
				1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan
			2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
				2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
				1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina
				2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM (nilai) Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah (nilai) Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah (level) Inovasi Perangkat Daerah	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

		(inovasi) Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD
			3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

					Disediakan
	6	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)				
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
	6	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)				
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		

				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Kelompok sasaran adalah kumpulan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 secara lengkap tersaji pada Tabel 6.2.

Tabel. 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDI KATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDNANAAN								KONDISI PADA AKHIR RENTRA		
								Tahun-1		Tahun-1		Tahun-1		Tahun-1				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraa n pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		Capaian SAKIP Perangkat Daerah		nilai		70-80		70-80		70-80		70-80		70-80		
			2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	nilai	NA	3,05 - 3,52		3,05 - 3,52		3,05 - 3,52		3,05 - 3,52		3,05 - 3,52		
					Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	nilai	NA	61-75		61-75		76-90		76-90		76-90		
					Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	level	NA	1		1		1		1		1		
					Inovasi Perangkat Daerah	inovasi	NA	menuju Informatif		menuju Informatif		menuju Informatif		menuju Informatif		menuju Informatif		
					Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	NA	100		100		100		100		100		
			2.09.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	1.160.250.000	
			2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen		2	66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	2	87.846.000	8	306.306.000	

				Daerah	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		2	12.000.000	2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000	8	55.692.000
			2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		2	12.000.000	2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000	8	55.692.000
			2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	8	46.410.000
			2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	8	46.410.000
			2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		12	70.000.000	12	77.000.000	12	84.700.000	12	93.170.000	48	324.870.000
			2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan		3	70.000.000	3	77.000.000	3	84.700.000	4	93.170.000	13	324.870.000
			2.09.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah			100%	16.799.622.000	100%	17.630.854.000	100%	18.499.546.000	100%	19.419.096.000	100%	72.349.118.000
			2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji	Jumlah Orang	Orang/		60,00	16.364.622.000	60,00	17.182.654.000	60,00	18.041.996.000	60,00	18.944.096.000	60,00	70.533.568.000

				dan Tunjangan ASN	yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan											
			2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	380.000.000	12	390.000.000	12	399.550.000	12	410.000.000	48	1.579.550.000
			2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	16.500.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	48	72.500.000
			2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen		1,00	5.500.000	1,00	6.000.000	1,00	6.000.000	1,00	8.000.000	4	25.500.000
			2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1,00	5.500.000	1,00	6.000.000	1,00	6.000.000	1,00	7.000.000	4	24.500.000
			2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen		18,00	27.500.000	18,00	28.000.000	18,00	28.000.000	18,00	30.000.000	72	113.500.000
			2.09.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persen		100%	50.500.000	100%	55.550.000	100%	61.105.000	100%	67.215.500	100%	234.370.500
			2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		1,00	50.500.000	1,00	55.550.000	1,00	61.105.000	1,00	67.215.500	4	234.370.500
			2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen		100%	511.338.300	100%	562.472.130	100%	563.090.803	100%	680.552.544	100%	2.317.453.777
			2.09.01.1.06.01	Penyediaan	Jumlah Paket	Paket		1	11.550.000	1	12.705.000	1	12.705.000	1	15.373.050	4	52.333.050

				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
			2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	102.322.000	1	112.554.200	1	112.554.200	1	136.190.594	4	463.620.994
			2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	207.090.400	1	227.799.440	1	227.799.440	1	275.600.000	4	938.289.280
			2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen		1	55.000.000	1	60.500.000	1	60.500.000	1	73.205.000	4	249.205.000
			2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Laporan		1	13.002.000	1	14.302.200	1	14.302.200	1	17.305.000	4	58.911.400
			2.09.01.1.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen		1	116.749.600	1	128.424.560	1	128.424.560	1	155.393.000	4	528.991.720
			2.09.01.1.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan		1	5.624.300	1	6.186.730	1	6.805.403	1	7.485.900	4	26.102.333
			2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persen		100%	97.963.800	100%	152.593.480	100%	152.593.480	100%	178.416.881	100%	581.567.641
			2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	4.697.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.500.000	4	165.197.000
			2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	28.530.700	1	31.383.770	1	31.383.770	1	38.579.200	4	129.877.440

			2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan		12	23.688.500	12	26.057.350	12	26.057.350	12	28.663.085	12	104.466.285	
			2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	16.500.000	1	18.150.000	1	18.150.000	1	19.965.000	4	72.765.000	
			2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.630.000	1	5.000.000	4	15.560.000	
			2.09.01.1.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	21.247.600	1	23.372.360	1	23.372.360	1	25.709.596	4	93.701.916	
			2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70	1.500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	130	3.000.000.000	
			2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		40	1.000.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	70	1.900.000.000	
			2.09.01.1.07.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		30	5000.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	60	1.100.000.000	
			2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			12	1.507.609.400	12	1.658.370.340	12	1.675.971.674	12	1.862.704.300	12	6.704.655.714	
			2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Bulanan		12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.900.000	12	4.500.000	12	15.330.000	
			2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan Bulanan		12	313.966.400	12	345.363.040	12	362.694.374	12	417.889.270	12	1.439.913.084	

				dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
			2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Bulanan		12	1.190.343.000	12	1.309.377.300	12	1.309.377.300	12	1.440.315.030	12	5.249.412.630
			2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah			1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.993.000	1	4.500.000	1	15.423.000
			2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Bulanan		12	3.300.000	12	3.630.000	12	3.993.000	12	4.500.000		15.423.000
			2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3	1.015.759.200	3	879.435.120	3	879.435.120	3	937.378.632	3	3.715.008.072
			2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		18	388.709.200	18	427.580.120	18	427.580.120	18	470.338.132,00	18	1.714.207.572
			2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		107	138.050.000	107	151.855.000	107	151.855.000	107	167.040.500,00	107	608.800.500
			2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	492.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.293.000.000
			2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)				2	46.200.000	2	79.930.000	2	79.930.000	2	87.923.000	8	293.983.000

			2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		3	36.300.000	3	39.930.000	3	39.930.000	3	43.923.000,00	12	160.083.000	
			2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10	9.900.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	44.000.000,00	40	133.900.000	
Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	2.09.02	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	NA	100	1.700.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.300.000.000	
			2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Persen	NA	100	1.700.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	5.300.000.000	
			2.09.02.1.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	NA	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	40	2.000.000.000	
			2.09.02.1.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Laporan	NA	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	16	2.400.000.000	
			2.09.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	NA	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	
			2.09.02.1.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk	Dokumen	NA	1	500.000.000	0		0		0		1	500.000.000	

				Kemandirian Pangan	Mendukung Kemandirian Pangan												
			2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	85,00	87,00	19.676.557.300	88,00	5.000.000.000	89,00	4.825.000.000	90,00	4.950.000.000	90,00	34.451.557.300
			2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Laporan		6	1.706.287.000	5	1.000.000.000	5	800.000.000	5	900.000.000	21	4.406.278.000
			2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000
			2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000
			2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Prognosa Harga	Laporan		1	341.850.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	941.850.000
			2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Dokumen		2	964.428.000	1	400.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	5	1.864.428.000
			2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Laporan		3	16.920.279.300	3	2.950.000.000	3	2.975.000.000	3	3.000.000.000	12	25.845.279.300
			2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian	Laporan		1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	44	925.000.000

					Cadangan Pangan Provinsi												
		2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen		1	200.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	4	900.000.000	
		2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan		1	6.520.279.300	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	4	24.020.279.300	
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Laporan		7	1.050.000.000	7	1.050.000.000	7	1.050.000.000	7	1.050.000.000	28	4.200.000.000	
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan		3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	12	2.000.000.000	
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)	Laporan		3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	12	1.800.000.000	
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	
		2.09.04	Program	Persentase	Persen	NA	22,22	6.260.195.789	50,00	1.774.758.540	77,22	2.927.826.595	100,00	1.562.682.879	100	12.525.463.803	

				Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan												
			2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Dokumen		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000
			2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000
			2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persen		100	5.960.195.789	100	1.474.758.540	100	2.627.826.595	100	1.262.682.879	100	11.325.463.803
			2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Laporan		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	1.200.000.000
			2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kecamatan		4	1.200.000.000	5	1.500.000.000	4	1.200.000.000	5	1.500.000.000	18	5.400.000.000
			2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	NA	25	3.300.000.000	50,00	5.856.917.930	75	11.679.330.923	100,00	3.409.278.143	100	24.245.526.996

			2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen		57	3.300.000.000	67	5.856.917.930	77	11.679.330.923	102	3.409.278.143	303	24.245.526.996	
			2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen		1	300.000.000	1	330.000.000	1	370.000.000	1	400.000.000	4	1.400.000.000	
			2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		30	300.000.000	40	330.000.000	40	363.000.000	60	399.300.000	170	1.392.300.000	
			2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		25	200.000.000	30	220.000.000	30	242.000.000	40	266.200.000	125	928.200.000	
			2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen		1	2.500.000.000	1	4.976.917.930	1	10.704.330.923	1	2.343.778.143	4	20.525.026.996	

BAB 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Terwujudnya ketahanan pangan di suatu wilayah adalah hasil kerja dari suatu sistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, terwujudnya ketahanan pangan merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu indikator kinerja dalam RPJMD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan di bidang ketahanan pangan di atas, maka dapat diidentifikasi indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDI SI KINER JA AKHIR RPJMD
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aspek Pelayanan Umum						
1.1	Fokus Administrasi Pemerintahan						
1.1.1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (nilai)		70-80	70-80	70-80	70-80	70-80

2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan non Dasar						
2.1.1	Pangan Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: Skor)	70,23	70,73	71,23	71,73	72,23	72,23

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Nilai)		3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52
2	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah (nilai)		61-75	61-75	76-90	76-90	76-90
3	Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah (level)		menuju Informatif	menuju Informatif	menuju Informatif	menuju Informatif	menuju Informatif
4	Inovasi Perangkat Daerah (inovasi)		1	1	1	1	1
5	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)		100	100	100	100	100
II.	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan						
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (%)	-	100	100	100	100	100

III.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85	87	88	89	90	90
IV.	Program Penanganan Kerawanan Pangan						
1	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	-	22,22	50,00	77,22	100	100
IV.	Program Pengawasan Keamanan Pangan						
1.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	-	25	50	75	100	100

Definisi Operasional Indikator Kinerja Ketahanan Pangan :

a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (%)

Persentase Cadangan Pangan adalah jumlah cadangan pangan pemerintah dibagi jumlah kebutuhan pangan provinsi.

Rumu

s :

Jumlah Cadangan Pangan Provinsi	
	X 100 %
Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi	

b. Skor Pola Pangan Harapan

Kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup, melalui berbagai sumber atau kombinasi cadangan pangan yang dimiliki, hasil produksi pangan, pembelian/barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan.

Rumus :

$$\text{Skor PPH} = \text{skor PPH kelompok padi-padian} \\ + \text{umbi-umbian} + \dots + \text{skor PPH} \\ \text{kelompok lain-lain.}$$

c. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Jumlah penanganan daerah rawan pangan 18 Kecamatan.

Rumus :

$$\text{Persentase daerah rawan pangan} = \frac{\text{Jumlah daerah rawan pangan}}{\text{Jumlah total daerah}}$$

d. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak 400 Sertifikat / Register

Rumus :

$$\frac{N^0 + N^{-1} + \dots + N^{-n}}{N \text{ total}}$$

Keterangan :

N total = Jumlah Sertifikat/Register

N^0 = Jumlah Sertifikat/Register Tahun perhitungan/berjalan

N^{-1} = Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya

N^{-n} = Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya N^{-1}

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 yang telah tersusun ini diharapkan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya tujuan **"Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah"**.

Dalam tahap implementasi, amanat yang digariskan dalam Renstra ini, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan, di samping konsistensi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terhadap komitmen tersebut di atas.

Serang, Maret 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN



Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH, MM
Ketua Muda
NIP. 19640614 199803 2 001

Lampiran 1. Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran dan Program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran/Program	Meta Indikator (Definisi Operasional)	Rumus Perhitungan
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Skor)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3}$ <p>dengan: \bar{X} = rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana i menunjukkan dimensi. (rentang nilainya $0 \leq \bar{X} \leq 23$ atau dalam bentuk persentase $0\% \leq \bar{X} \leq 100\%$)</p>
2	Persentase Cadangan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (%)	Persentase Cadangan Pangan adalah jumlah cadangan pangan pemerintah dibagi jumlah kebutuhan pangan provinsi	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Provinsi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan Provinsi}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Diversifikasi, Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (%)	Skor PPH susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan, untuk memenuhi energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah mutu yang mempertimbangkan aspek ketersediaan pangan	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Skor PPH = skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + + skor PPH kelompok lain-lain. </div>
4	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	Jumlah penanganan daerah rawan pangan 18 Kecamatan	Persentase daerah rawan pangan = Jumlah daerah rawan pangan dibagi jumlah total daerah
5	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebanyak	$\frac{N^0 + N^1 + \dots + N^n}{N \text{ total}}$

			400 Sertifikat / Register	<p>Keterangan :</p> <p>N_{total} = Jumlah Sertifikat/Register</p> <p>N^0 = Jumlah Sertifikat/Register Tahun perhitungan/berjalan</p> <p>N^{-1} = Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya</p> <p>N^{-n} = Jumlah Sertifikat tahun sebelumnya N^{-1}</p>
6	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Nilai)		
		Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah (Nilai)		
		Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah (Nilai)		
		Inovasi Perangkat Daerah (Inovasi)		
		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)		

Lampiran 2. Pohon Masalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Ketersediaan Pangan Strategis Dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan	Belum Optimalnya upaya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Belum Optimalnya Cadangan Pangan Strategis ;• Belum Optimalnya Diversifikasi Pangan;• Belum Optimalnya Penanganan Kerawanan Pangan;• Belum Optimalnya Ketersediaan dan Sumberdaya Pangan dalam Mendukung Ketersediaan Pangan di Provinsi Banten;• Belum Memadainya Infrastruktur dan Penunjangnya bagi Kemandirian Pangan dalam berbagai Sektor;• Belum Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan

Lampiran 3. Cascading Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Visi	Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				Penanggung Jawab
											2023	2024	2025	2026	
Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Skor)				70,23	71,23	71,73	72,23	
								Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	100	Bidang
								Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Persen	100	100	100	100	
								Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	10	10	10	10	
								Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	4	4	4	4	
								Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1	1	1	
								Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian	Dokumen	1	0	0	0	

								Pangan						
								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	87,00	88,00	89,00	90,00
								Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Laporan	6	5	5	5
								Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	2	2	2
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1	1	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Prognosa Harga	Laporan	1	1	1	1
								Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Dokumen	2	1	1	1
								Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Laporan	3	3	3	3
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian	Laporan	1	1	1	1

								Cadangan Pangan Provinsi						
							Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1	1	1	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	
							Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Laporan	7	7	7	7	
							Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pembinaan Sumberdaya Manusia dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	3	3	3	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	3	3	3	3	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1	1	1	
							Program Penanganan	Persentase	Persen	22,22	50,00	77,22	100,00	

								Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan						
								Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Dokumen	1	1	1	1	
								Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	1	1	1	
								Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persen	100	100	100	100	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	
								Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kecamatan	4	5	4	5	
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	25	50	75	100	
								Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan		Dokumen	57	67	77	102	

								Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
								Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	1	1	1	1	
								Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	30	40	40	60	
								Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	25	30	30	40	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	1	1	1	
	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)				70-80	70-80	70-80	70-80	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	nilai	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	
									Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	nilai	61-75	61-75	76-90	76-90	
									Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	level	1	1	1	1	
									Inovasi Perangkat Daerah	inovasi	menuju Informatif	menuju Informatif	menuju Informatif	menuju Informatif	
									Persentase Ketercapaian dari	%	100	100	100	100	

								Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi							
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	2	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2	2	2	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2	2	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	2	2	
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	2	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	
								Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen	3	3	3	3	4	

*Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten – Tahun 2017 - 2022*

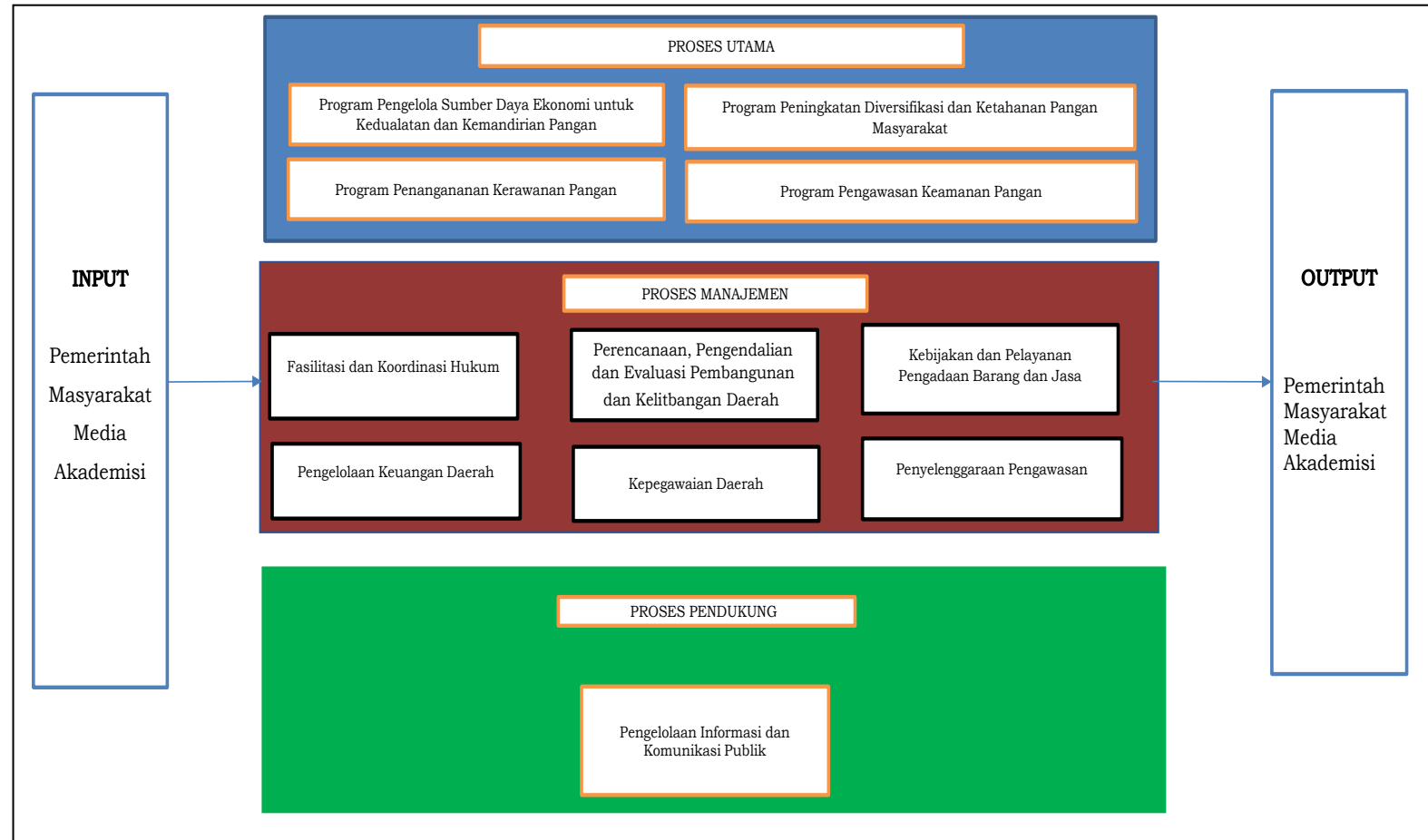
							Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah						
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	60,00	60,00	60,00	60,00	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	12	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	
							Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	100%	100%	100%	100%	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persen	100%	100%	100%	100%	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	Orang	1,00	1,00	1,00	1,00	

								dan Pelatihan						
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	1	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	1	1	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	1	1	
								Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Dokumen	1	1	1	1	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	1	1	
								Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Persen	100%	100%	100%	100%	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	1	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	1	1	

							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	12	12	
							Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	
							Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70	20	20	20	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	10	10	10	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	10	10	10	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah		12	12	12	12	
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Bulanan	12	12	12	12	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Bulanan	12	12	12	12	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Bulanan	12	12	12	12	
							Penyediaan Jasa	Persentase		1	1	1	1	

							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah							
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Bulanan	12	12	12	12		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	3	3	3		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	18	18		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	107	107	107	107		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)			2	2	2	2		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	3	3	3		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	10		

Lampiran 4. Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten



Lampiran 5. Pohon KInerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	NUMENKLTUR PROGRAM PEMBANGUNAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SUB
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Tahunan yang Disesuaikan	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya infrastruktur lantai jemur	
									Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Kemandirian Pangan	
									Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
									Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Tersusunnya Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	
									Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	
									Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Berkembangnya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi pangan	
									Pengelolaan dan	Koordinasi dan	Terlaksananya

								Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi		
									Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		
									Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		
									Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		
											Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
										Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya Koodinasi dan Sinkronisasi

									Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
									Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
						Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
									Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
									Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan